

STRATEGI HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI DPRD KABUPATEN BADUNG DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN BADUNG

Pande Putu Regina Maharani⁽¹⁾ Tedi Erviantono⁽²⁾ Gede Indra Pramana⁽³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

reginamaharanimaharani5@student.unud.ac.id⁽¹⁾ erviantono2@unud.ac.id⁽²⁾
indraprama@unud.ac.id⁽³⁾

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Public Relations and Protocol of the Badung Regency DPRD in maintaining the performance and image of the Badung Regency DPRD. Badung DPRD Public Relations plays a fairly important role in the correlation of internal and external relations. The activities of the leaders and members of the board are always publicized and will certainly cause stigma from the community. To suppress bad things, Badung Regency DPRD Public Relations needs to have a strategy in carrying out its duties and functions. This research was made to find out the strategy used by the Public Relations and Protocol Coordinator of the Badung Regency DPRD and the researchers participating as participant observers, so that the research could be more focused. This research is a descriptive qualitative with data collection techniques in the form of participant observation, interviews and supported document data which will be processed later. The results of this study indicate that the Public Relations, Protocol and Publication of the Badung Regency DPRD carry out their role very well, namely building functional relationships with the public, both institutionally by establishing partnerships with the media such as mass media, print and online in order to publish news on DPRD activities.

Keywords: Strategy, Public Relations, Activities of DPRD Badung Regency, Local Government.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah yang baik dan jujur di mata masyarakat merupakan suatu pembahasan yang penting dalam membahas mengenai kebijakan pemerintahan. Kebutuhan akan ide-ide dari masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan peningkatan keilmuan dan wawasan warga titik adapun bentuk pemerintahan yang baik dan bersih yakni merupakan suatu impian dari pemerintahan

yang sifatnya demokratis. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam kekuasaan politik bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Orang membuat keputusan tentang masalah penting kehidupan di tingkat akhir, termasuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dan nasional. Jadi politik memainkan peran yang sangat penting. Peran-peran tersebut yang menentukan kehidupan masyarakat.

Organisasi humas atau disebut dengan istilah Hubungan Masyarakat mempunyai kedudukan yang penting di pemerintahan khususnya di dunia politik selayaknya anggota DPRD. Sebagai instansi pemerintahan, DPRD Kabupaten Badung mempunyai hak serta keharusan untuk memberikan dan menyalurkan berita secara umum dan tidak boleh ditutup-tutupi kepada masyarakat. Bagian humas DPRD memiliki tugas Salah satunya yaitu menjalankan fungsi di media relation sebagai salah satu kegiatan dari humas itu sendiri titik tiap instansi terutama yang berkiprah di pemerintahan pasti membutuhkan citra yang positif di kalangan publik maupun internal instansi. Salah satu yang diinginkan oleh suatu pemerintahan yakni adanya citra yang baik hal inilah yang menjadi tugas pokok dari seorang humas dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan khususnya publik relation. Keberhasilan instansi pemerintahan tentunya berhasil karena berkat bantuan dari bagian Hubungan Masyarakat. Salah satu tujuan humas itu sendiri sebagai manajemen yang perannya menghadirkan komunikasi ataupun hubungan serta menjaga keharmonisan di berbagai pihak baik itu masyarakat ataupun instansi lainnya dan tentunya hal ini membawa dampak positif bagi instansi di masa yang akan datang.

Public Relations menggunakan suatu sistem dalam berkomunikasi agar mempunyai atau mendapatkan interaksi dari pihak dan satunya dan untuk menggapai tujuan dalam suatu instansi, menjauhi konflik yang kemungkinan akan dirasakan yang kemudian akan mengeluarkan output hingga tercapai Citra positif (*good image*). Demikian halnya bagian humas yang ada di DPRD kabupaten Badung.

DPRD kabupaten Badung berjumlah 40 anggota dan tentunya memiliki kewajiban untuk mengayomi masyarakat Kabupaten Badung karena DPRD lah yang menjadi penyambung lidah masyarakat. Penetapan kursi di DPRD kabupaten Badung periode 2019-2024 didasarkan pada angka hasil pembagian antara jumlah suara sah di kabupaten Badung. Adapun berbagai partai yang mendapatkan posisi di DPRD kabupaten Badung yakni Demokrat dengan 28 kursi, partai golongan Karya dengan tujuh kursi, Partai Demokrat Dua Kursi, partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra 2 kursi dan Partai Nasional Demokrat atau Nasdem 1 kursi. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah rapat anggota DPRD.

Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota kelompok. Setiap fraksi DPRD sekurang-kurangnya memiliki jumlah panitia yang sama di DPRD. Pada saat periode keanggotaan DPRD, fraksi yang telah disampaikan dalam sidang paripurna itu tidak bisa lagi diganggu gugat. Terdapat tiga fraksi dalam DPRD Kabupaten Badung yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Fraksi Partai Golkar dan fraksi Badung Gede atau Gerindra Demokrat. Suatu fraksi diharapkan menyampaikan laporan kinerja setiap tahunnya yang berisi tentang cara pandang ataupun sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang telah diambil sesuai dengan tata cara fungsi pembentukan Perda pengawasan serta anggaran yang telah ditentukan dan aspirasi ataupun pengaduan Apabila ada masyarakat yang mengeluh serta upaya yang seharusnya dilakukan tetapi belum terealisasikan. Beberapa fraksi tersebut mampu dijadikan sebagai pertimbangan kepada

pimpinan DPRD tentang hal-hal yang perlu, berkenaan dengan bidang atau kewajiban DPRD, diminta ataupun tidak diminta. Oleh karenanya pihak humas tentunya bisa berperan aktif dalam penciptaan pembangunan dan peningkatan serta mampu menjaga citra DPRD Kabupaten Badung di masyarakat, serta memiliki keharusan untuk menjaga keharmonisan hubungan atau interaksi di antara sesama masyarakat sehingga muncul citra yang baik.

Di sini, posisi humas DPRD harus bisa mengamati dan mempelajari keinginan masyarakat dan anggotanya, serta bagian yang bisa memberikan saran dan masukan yang seharusnya dilakukan DPRD sebagai lembaga pemerintah saat menerima dan menerima. menjawab semua keinginan masyarakat tanpa menyinggung pihak manapun namun tetap membangun hubungan baik dan menciptakan rasa percaya antara masyarakat dan aparatur pemerintah (Endarta, 2011). Belakang ini masyarakat juga kepercayaannya kepada pemerintah semakin berkurang, hal ini karena adanya harapan-harapan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga DPR di sini memiliki kewajiban untuk menghadirkan transparansi dan membantu masyarakat untuk mengajukan aspirasinya dan bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat. Untuk mencapai komunikasi dan koordinasi yang baik DPR membutuhkan adanya sumbangsih dan kerjasama yang baik khususnya bagi media di dalam menciptakan interaksi yang baik dan kunci tercapainya tujuan dari humas itu sendiri.

Parlemen dan media tentunya memiliki hubungan yang sangat erat dalam sebuah struktur yang membutuhkan ikatan

kelembagaan. Tetapi, institusi kedua tersebut butuh kehadiran mitra baik itu informasi, komunikasi dan pengendalian sosial. Kemitraan dengan pers sangat penting bagi legislator karena perannya sangat dibutuhkan dalam penyebarluasan kegiatan legislatif. Pengelolaan fungsi penindakan dan pengawasan terkait pengembangan implementasi. Untuk itu, sangat penting bagi penulis untuk mempertimbangkan peranan dan peranan Humas, Protokoler dan Publikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan DPRD Kabupaten Badung yang baik. Menjaga citra dan kinerja.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pada penelitian “Strategi Humas, Protokol dan Publikasi DPRD Kabupaten Badung dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Badung” ini, berhenti dalam menyusun karya tulis ilmiah ini tentunya berpacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan mempunyai relevansi dan keterkaitan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka atau riset yang dijadikan sebagai referensi dalam membandingkan dengan hasil penelitian ini.

Pertama, penelitian berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*, dilakukan oleh Budiyo (2017)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tingkat keberhasilan sebuah instansi penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan tugas berbagai bidang di pemerintahan daerah. Suatu unsur yang dimaksud yakni pemerintahan daerah yang posisinya sebagai lembaga eksklusif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemerintah khususnya

pemerintah daerah di dalam menciptakan daerah yang maju karena sejatinya DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang posisinya berada di daerah dan tentunya menjadi penyambung lidah dan aspirasi bagi rakyat.

Kedua, jurnal ini berjudul “Strategi Divisi Humas dan Protokol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan oleh Malinda Martina (2018)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengelola hubungan dengan *media relations*, pihak Humas DPRD Provinsi Jawa Barat mengembangkan strateginya dengan menganalisis lingkungan eksternal. Dalam mengembangkan jaringan, Humas masuk ke dalam organisasi yaitu Bakohumas dan menjalin hubungan juga dengan jurnalistik.

Ketiga, riset ini berjudul “Peran Humas DPRD Dalam Menjaga Kinerja dan Citra DPRD (Studi pada DPRD Kabupaten Bima) dilakukan oleh Haeril, Mas’Ud dan Taufik (2020)”. Secara garis besar isi penelitian ini adalah bagaimana Humas DPRD Kabupaten Bima dapat mewujudkan kewajibannya di dalam menciptakan relasi sesuai dengan fungsinya di masyarakat umum dalam kelembagaan dengan tetap menjaga Mitra dan Citra melalui penyebaran di media cetak ataupun media sosial. Adapun beberapa dokumentasi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bima yakni untuk menciptakan pelayanan melalui *Media center* dengan penggunaan akun dari media sosial atas nama DPRD.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penulisan kajian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini

menggunakan hipotesis untuk mendefinisikan kondisi sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Masalah itu peneliti juga menyebarkan beberapa hasil dari observasi di lapangan mengenai strategi dan bentuk yang menjadi tugas dari humas, Protokol dan Publikasi DPRD Kabupaten Badung dalam hal ikut serta membantu pemerintah mewujudkan *good governance* untuk Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan dan kemudian mengamati partisipasi yang terjadi dan bertindak sebagai pengamat. Disimpulkan karna penulis terjun langsung dilapangan, sehingga penulisan karya tulis ini bisa dipastikan keasliannya tanpa menggunakan variabel palsu. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer melalui kajian langsung terhadap objek yang dijadikan poin penting dari penelitian ini dan menjadi keterangan data saat mewawancarai informan, di sisi lain penggunaan data sekunder juga diperlukan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersumber dari majalah, jurnal ataupun penelitian sebelumnya.

Selain itu, peneliti mengumpulkan data juga menggunakan metode wawancara dengan kepala bagian humas protokol dan publikasi DPRD Kabupaten Badung dan tentunya menjadikan buku-buku sebagai faktor pendukung seperti halnya buku profil DPRD Kabupaten Badung. Beberapa data dan informasi yang ditemukan di lapangan kemudian dikaji kembali untuk kemudian bisa menyelaraskan dengan keseluruhan baik itu observasi kaum wawancara ataupun sumber-sumber lainnya. Tujuan peneliti mensinkronkan beberapa bagian tersebut agar bisa saling menyatu di antara pembahasan yang sama

dengan mudah di dalam membuat sebuah laporan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar *Good Governance*

Kata "tata kelola" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "manajemen". Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *governance* adalah proses penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat itu sendiri. Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan nasional di semua tingkatan. Persyaratan minimum untuk tata kelola yang baik adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan efektivitas. Dari uraian singkat di atas, tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada suatu instansi pemerintah berarti mengelola sumber daya dan persoalannya secara terbuka, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta memperhatikan kebutuhannya dan keterampilan.

Mekanisme Humas DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD Kabupaten Badung mempunyai beberapa cara dalam menampung aspirasi masyarakatnya, salah satunya melalui kegiatan *reses*. Dalam kegiatan *reses* ini tiap anggota dewan melakukan kunjungan langsung turun lapangan di Daerah Pilihannya (DAPIL) masing-masing untuk mengetahui perkembangan dan kendala serta permasalahan yang terjadi di daerah pilihannya. Selain dapat secara langsung menyerap aspirasi masyarakat disana, kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi serta dapat mengukur skala prioritas untuk pembangunan daerah kedepannya.

Peran Humas Protokol DPRD Badung dalam Mewujudkan Fungsinya

Terkait tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2016 tentang 'Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' Pasal 2 Ayat 1, "Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah tanggung jawab kepada Pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah" dan Ayat 2 "Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah".

Sekretariat DPRD Kabupaten Badung merupakan lembaga pemerintahan yang merepresentasikan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. Anggota DPRD adalah suatu tempat untuk beredarnya fungsi dari dasar negara kita yaitu Pancasila. DPRD memiliki kedudukan yang penting di dalam bagian dari pemerintahan daerah yang mendukung aspirasi masyarakat dan mempunyai visi yakni 'mewujudkan tata tertib administrasi dalam melayani masyarakat secara optimal dan mendukung kelancaran tugas pokok serta fungsi dari DPR daerah Kabupaten Badung' dan Adapun misinya yaitu "

menciptakan pegawai sekretaris DPRD yang memiliki kualitas tinggi dalam melakukan kegiatan-kegiatan bagi langsung maupun tidak langsung dan terarah yang berfungsi untuk meningkatkan perspek kerja dari DPRD kabupaten Badung' selain itu DPRD Kabupaten Badung juga perlu menghadirkan kondisi yang kondusif dalam mengembangkan dan demi kemajuan serta tingkatan Pembangunan Daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah daerah, dengan mengemban visi 'Terwujudnya tertib administrasi dan pelayanan yang prima dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung' dan misi 'Mewujudkan aparatur Sekretariat DPRD yang profesional melakukan berbagai kegiatan langsung yang diarahkan untuk memfasilitasi dan mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Badung' harus dapat menciptakan suasana kondusif untuk perkembangan, kemajuan dan laju pembangunan daerah demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kendala Humas Protokol DPRD Badung dalam Mewujudkan Fungsinya

Kendala yang dihadapi oleh Bagian Humas Protokol DPRD Kabupaten Badung dalam mewujudkan good governance disini yakni:

1. Saat penerimaan tamu kunjungan kerja dari DPRD dalam daerah maupun luar daerah, terdapat beberapa tamu saat akan mengurus administratif terkait study banding oleh DPRD nya kurang membawa data pelengkap, seperti SPPD/SPT/Surat Pengantar atau

Pemberitahuan Kunjungan. Karena dapat dikatakan bahwa data pelengkap tersebut merupakan faktor penunjang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penerimaan tamu pun adanya kunjungan kerja pihak lainnya.

2. Terbilang cukup sering Pimpinan atau Anggota Dewan membatalkan untuk menghadiri sebuah acara,
3. Berbalik dengan kendala nomor dua, para Pimpinan maupun Anggota Dewan tanpa terduga juga menghadiri sebuah acara dan peran Humas, Protokol dan Publikasi disini kesusahan untuk menyetarakan/mengatur waktu. Berkaitan juga dengan faktor waktu, karena sulitnya menyesuaikan jadwal Anggota Dewan jika terdapat tamu kunjungan maka pihak Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Badung hanya menerima melalui Kepala-Kepala Bagian maupun Kepala Sub Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, faktor kesibukan ini agaknya menjadi salah satu kendala bagian Humas Protokol. Namun tak jarang pula para tamu disambut langsung oleh Anggota Dewan yang sedang tidak dinas ataupun langsung diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung.

Humas DPRD Kabupaten Badung dalam Mengelola Relasi saat Menjalankan Fungsi Media *Relations* untuk Meningkatkan Citra

Humas DPRD Kabupaten Badung berusaha secara optimal dalam menyampaikan informasi melalui media cetak ataupun sosial kepada berbagai wartawan yang membutuhkan

informasi tersebut. Setiap hari informasi akan terus ada dan diberikan kepada berbagai pihak media seperti halnya beberapa informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ataupun sedang berlangsung. Mengelola sebuah relasi dibagi menjadi dua sistem yakni Relasi Tugas dan Relasi Pribadi, yang dimana Relasi Tugas meliputi kegiatan-kegiatan parlemen DPRD berikutnya Relasi Pribadi yaitu silaturahmi dengan pihak-pihak media seperti diadakannya media gathering. Terkait hal mengelola relasi Humas DPRD Kabupaten Badung sangat cukup terbina dan baik dalam menjalankannya karena tidak lepas dari pengawasan Kepala Sub Bagian Humas Protokol.

Humas DPRD Kabupaten Badung terkait Mengembangkan Strateginya dalam Menjalankan Fungsi Untuk Meningkatkan Citra Instansi

Strategi Humas Protokol terkait bagaimana mereka menjalankan fungsi media relations adalah dengan mengefektifkan relasi semua media yang terdapat dalam daftar kerjasama media, media yang dimaksud adalah media cetak, media elektronik dan juga media internet. Indikator dalam penyusunan strategi yakni menganalisa kekuatan, kelemahan dan humas juga punya taktik serta prinsip dalam menjalankan fungsi *media relations*.

Kekuatan yang dimilikinya adalah humas melakukan hubungan yang tergolong harmonis dengan sempurna ke beberapa pihak media massa sedangkan kelemahannya adalah cenderung pada kurangnya SDM yang dimiliki, taktik yang dilakukannya adalah dengan bersosialisasi lalu prinsip yang mereka terapkan

saling menguntungkan antara pihak media dan juga humas.

5. KESIMPULAN

Bagian Humas dikatakan sebagai *media relations* tentu melakukan fungsinya yakni memberikan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan melalui Bagian Publikasi dalam mengelolanya. Saat ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan humas menjadi utama dan tentunya diperlukan di berbagai bidang khususnya dalam bidang pemerintahan dan masyarakat publik. Humas memiliki tugas utama sebagai penyambung informasi dan mendukung harapan-harapan masyarakat kepada pemerintah daerah. Humas, Protokol dan Publikasi membangun dan memelihara tali kerjasama dengan pihak media dengan memberikan informasi yang merata, tidak ada tumpang tindih. Strategi tersebut dilakukan agar tersampaikan dengan baik dan tercipta hubungan yang harmonis serta terbina dengan baik.

Humas dan protokol serta publikasi DPRD kabupaten Badung yang merupakan pihak yang terkait dalam hal ini serta disebut dengan bagian dalam lembaga pemerintahan daerah. Dengan dipublikasinya berbagai kegiatan keseharian anggota DPRD kabupaten Badung dan terjalinnya hubungan yang baik dengan kalangan masyarakat bisa menekan stigma negatif yang menyepelekan kinerja DPRD kabupaten Badung. Masyarakat juga bisa berpartisipasi di dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota DPRD kabupaten Badung yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri baik itu memberikan respon yang baik, masukkan ataupun pemberian saran yang sifatnya bisa membangun anggota DPRD kabupaten Badung.

Demi tercipta keterjalinan hubungan yang harmonis antar DPRD Kabupaten Badung serta warga humas tentunya harus mempunyai perencanaan tersendiri di dalam mempublikasikan kegiatannya tersebut. Disimpulkan strategi yang digunakan adalah mempublikasikan adanya kegiatan DPRD Kabupaten Badung baik melalui media cetak maupun media elektronik, meliputi akun Instagram Official DPRD Kabupaten Badung (@dprdkabbadung), website resmi DPRD Kabupaten Badung (www.dprdbadungkab.go.id), dan Media Massa Cetak (Koran).

Berbagai strategi yang telah dibahas yang tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun diberlakukannya strategi tersebut secara bersamaan, mampu memberikan keberimbangan kegiatan Humas, Protokol dan Publikasi DPRD Kabupaten Badung untuk dapat menjalankan peran dan fungsi bagiannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

2021. *Media Komunikasi dan Informasi*

BULETIN DPRD Kabupaten Badung.

Majalah DPRD Kabupaten Badung:
Badung.

DPRD Kabupaten Badung. *Profil DPRD*

Kabupaten Badung Masa Periode

2019-2024. Badung: Sekretariat DPRD
Kabupaten Badung.

Endarta, A.S. (2011). *Peran Humas Dprd*

Surakarta Dalam Membangun

Hubungan Dengan Media Tahun 2011.

Universitas Sebelas Maret: Jawa
Tengah.

Kabupaten Badung. (2016). *Peraturan Bupati*

Badung Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Badung:

DPRD Kabupaten Badung.

Sulistyoningsih. (2017). *STRATEGI HUMAS*

DAN PROTOKOL TERHADAP

PUBLIKASI KEGIATAN DPRD DIY.

Jurnal Ilmiah: Universitas UIN Sunan
Kalijaga.

Utomom, K.P. (2019). *Penerapan Fungsi Kerja*

dan Nilai Organisasi Pada Tingkat

Kepercayaan Masyarakat. Optimal:

Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan.